

**LAPORAN
PENGAWASAN DAN EVALUASI
KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK (KIP) TRIWULAN I
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Oleh

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Rizki Gayatri, S.Hum.

Asry Kurniawaty, S.S.

Desi Rachmawati, S.Pd.

Titik Susiawati, A.Md.

Arya Dwy Entaka, S.Pd.

**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023**

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga laporan pengawasan dan evaluasi Kebijakan Informasi Publik (KIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini merupakan sebuah upaya nyata untuk melakukan perbaikan internal lembaga. Kegiatan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari maklumat kesanggupan mengikuti ZI-WBK. Kegiatan yang dimaksud analisis bagian dalam proses yang dilakukan dalam menjalankan tupoksi lembaga.

Kegiatan ini berusaha memberikan deskripsi seperti apa Kebijakan Informasi Publik (KIP) yang sudah dilaksanakan. Lebih lanjut, dengan adanya kegiatan ini, secara internal Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengetahui ketepatan pelaksanaan dan alur, kesesuaian pelaksanaan dan prosedur yang diharapkan, dan saran perbaikan alur dan pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP) yang harus dilengkapi.

Harapan kami, semoga hasil kegiatan ini mempunyai nilai guna dan manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara terutama dalam bidang tata laksana Kebijakan Informasi Publik (KIP).

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Manfaat	3
4. Dasar Hukum	4
BAB II	5
METODE	5
1. Tahapan Kegiatan	5
2. Variabel	5
a. Objek	5
b. Responden	5
c. Teknik Pengumpulan Data	5
d. Bentuk Jawaban.....	6
e. Metode Pengolahan dan Analisis Data	7
f. Penyusunan Laporan	7
BAB III.....	8
HASIL EVALUASI.....	8
BAB IV.....	13
PENUTUP	13
1. Simpulan.....	13
2. Saran	14

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang melakukan kajian, pemasyarakatan, dan perlindungan bahasa dan sastra di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban memberikan pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Untuk melakukan tugas dan fungsi tersebut, kantor membuat prosedur pelaksanaan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, seluruh Kebijakan Informasi Publik (KIP) yang ada perlu untuk dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara internal supaya dapat berguna secara maksimal dalam melakukan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Kuesioner ini adalah alat penilaian bagi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui dan menilai implementasi Kebijakan Informasi Publik (KIP) Triwulan I Tahun 2023 di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. Manfaat

Kegiatan ini memiliki manfaat yang secara langsung dapat mengubah prosedur yang telah diterapkan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah perbaikan pada tahap-tahap tertentu atau bahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa; dan (3) surat keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 0107/I5.18/LK.06.00/2023. Kuesioner ini adalah alat penilaian bagi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui dan menilai implementasi Kebijakan Informasi Publik (KIP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB II METODE

1. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pengawasan dan evaluasi mencakup persiapan, pelaksanaan, pengolahan data, dan penyusunan laporan. Persiapan meliputi pembentukan tim, melaksanakan pengawasan berkala per triwulan pada tahun 2023, dan menyiapkan kuesioner evaluasi. Pelaksanaan triwulan I tahun 2023 dilakukan pada bulan Februari 2023 dan melibatkan 16 responden yang merupakan pegawai dan masyarakat pengguna layanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengolahan data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengunggah hasil kuesioner.

2. Variabel

Kegiatan pengawasan dan evaluasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kebijakan Informasi Publik (KIP) Triwulan I tahun 2023 menggunakan 10 variabel dengan empat indikator. Kesepuluh variabel tersebut adalah ketepatan, bagan alur, waktu, keharusan, kesesuaian, tupoksi, maklumat, penanganan, perbaikan, dan alur kerja. Indikator yang digunakan adalah usia, jenis kelamin, dan alamat.

a. Objek

Objek dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I tahun 2023.

b. Responden

Responden kegiatan terdiri atas 16 responden yang merupakan pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan masyarakat pengguna layanan informasi publik.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data kegiatan dikumpulkan menggunakan formulir google yang disebar

menggunakan tautan pada grup WhatsApp Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Bentuk Jawaban

Jawaban kuesioner menggunakan pilihan ganda dan isian bebas. Pilihan ganda terdiri atas 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban deskriptif dengan skala 1 – 4.

Kuesioner pengawasan dan evaluasi Kebijakan Informasi Publik (KIP) Triwulan 1 sebagai berikut.

KUESIONER KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pasal 28 ayat (2).

Tujuan

Kuesioner ini adalah alat penilaian bagi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui dan menilai implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Responden:

Usia : a. < 25 b. 25—40 c. 41—60 d. > 60

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Alamat : a. Mataram b. Lobar c. KLU d. Loteng e. Lotim f. KSB g. Sumbawa
h. Dompu i. Kota Bima j. Bima k. Luar NTB l. Lain-lain

KUESIONER

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan informasi publik yang diberikan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat?
a. Tidak tepat b. Kurang tepat c. Cukup tepat d. Sangat tepat
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur pemerolehan informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat?
a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Cukup mudah d. Sangat mudah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketetapan waktu pemberian informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat?
a. Tidak tepat b. Kurang tepat c. Cukup tepat d. Sangat tepat
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang keharusan mengkopi bahan informasi yang diminta?
a. Tidak tepat b. Kurang tepat c. Cukup tepat d. Sangat tepat
5. Apakah informasi yang diberikan dan diterima sesuai dengan yang diminta?

- a. Tidak tepat b. Kurang tepat c. Cukup tepat d. Sangat tepat
- 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang penguasaan materi oleh petugas dalam memberikan informasi layanan publik?
 - a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Cukup sesuai d. Sangat sesuai
- 7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan informasi publik?
 - a. Tidak menguasai b. Kurang menguasai c. Cukup menguasai d. Sangat menguasai
- 8. Bagaimana pendapat Saudara tentang maklumat pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggaraan layanan informasi publik?
 - a. Tidak sanggup b. Kurang sanggup c. Cukup sanggup d. Sangat sanggup
- 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan penanganan keberatan atas informasi publik?
 - a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cukup cepat d. Sangat cepat
- 10. Bagaimana pendapat saudara tentang keterbukaan informasi publik Kantor Bahasa Provinssi Nusa Tenggara Barat?
 - a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cukup cepat d. Sangat cepat

e. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini menggunakan statistik sederhana untuk mendapatkan jumlah jawaban responden.

f. Penyusunan Laporan

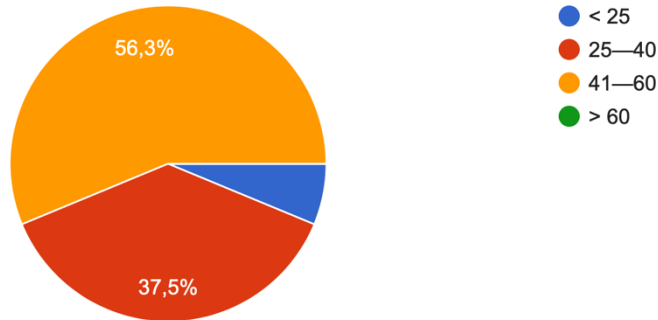
Penyusunan laporan kegiatan mengikuti pedoman penyusunan laporan. Pedoman yang dimaksud terdiri atas pendahuluan, metode, hasil, dan penutup.

BAB III HASIL EVALUASI

Keterangan responden

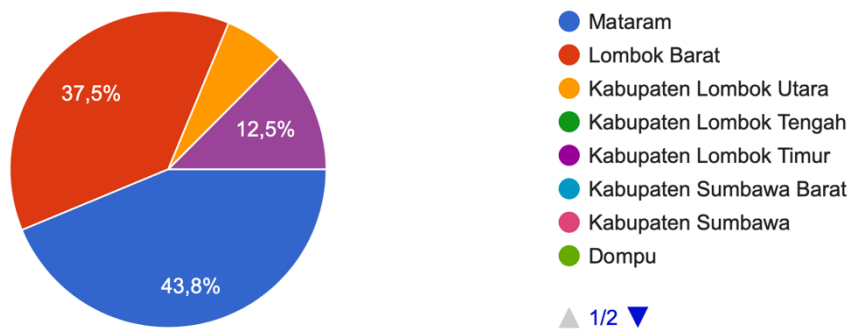
Usia

16 jawaban



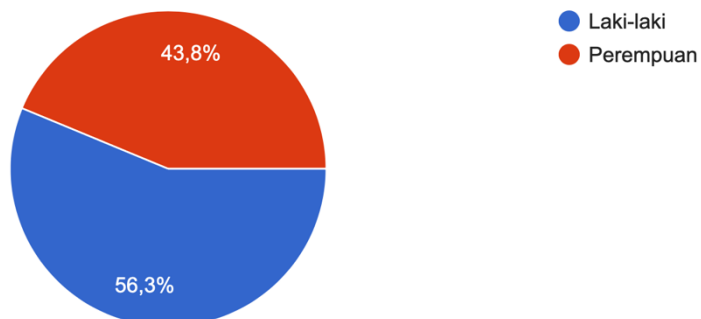
Alamat

16 jawaban



Jenis Kelamin

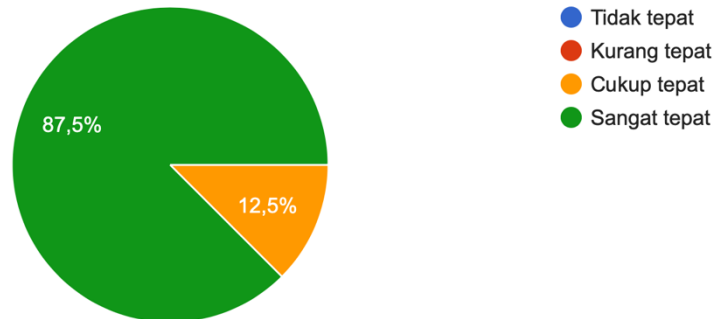
16 jawaban



Jawaban Isian

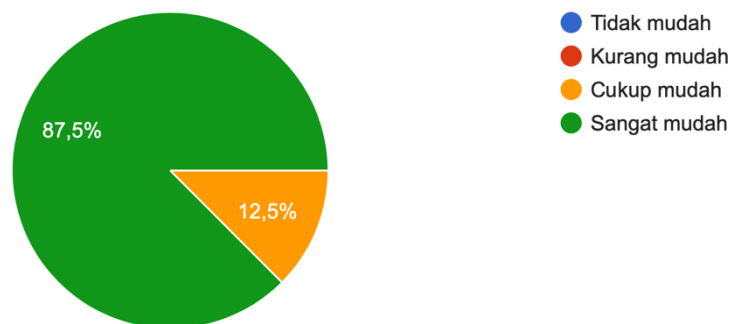
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan informasi publik yang diberikan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat?

16 jawaban



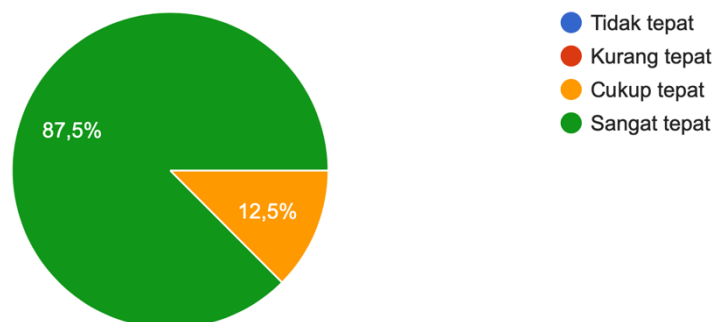
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur pemerolehan informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat?

16 jawaban



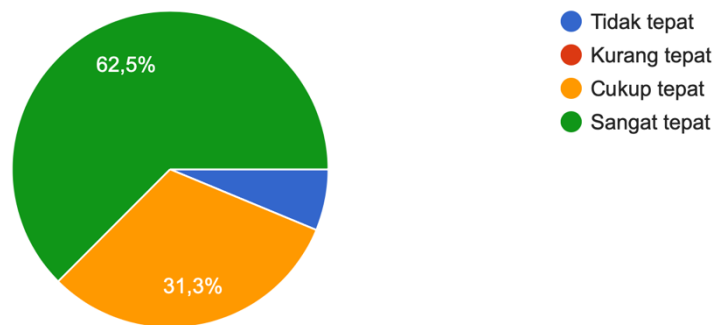
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketetapan waktu pemberian informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat?

16 jawaban



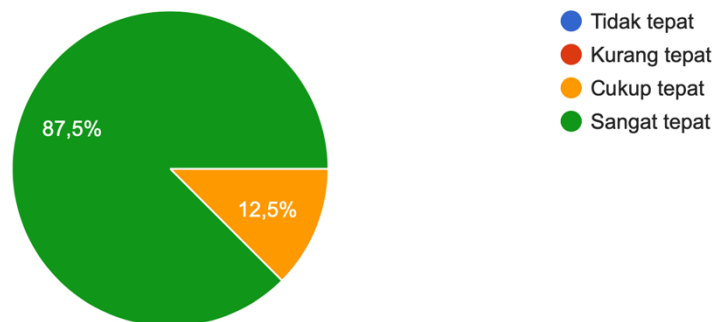
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang keharusan mengkopi bahan informasi yang diminta?

16 jawaban



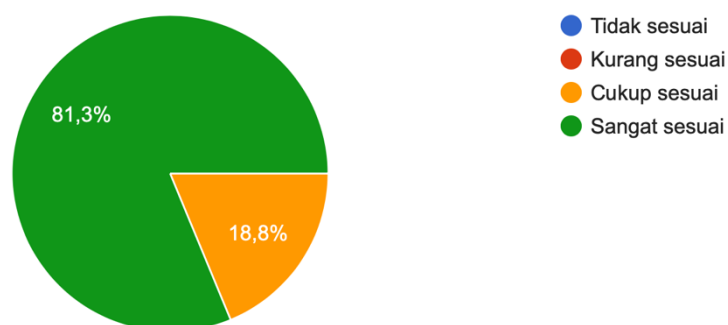
5. Apakah informasi yang diberikan dan diterima sesuai dengan yang diminta?

16 jawaban



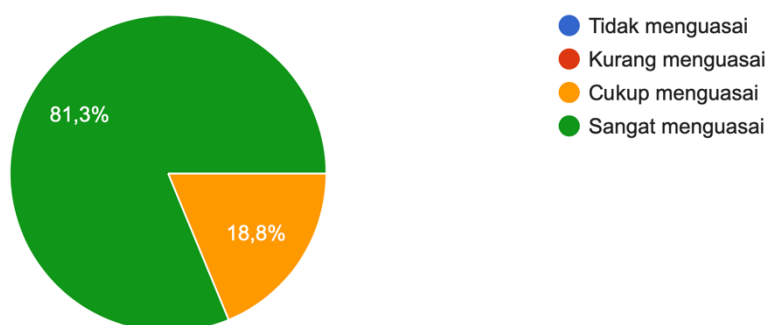
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang penguasaan materi oleh petugas dalam memberikan informasi layanan publik?

16 jawaban



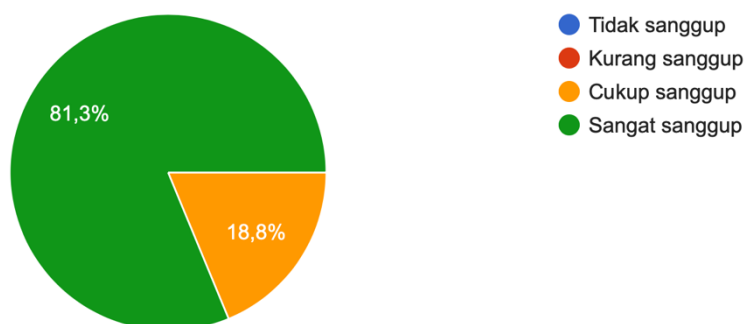
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan informasi publik?

16 jawaban



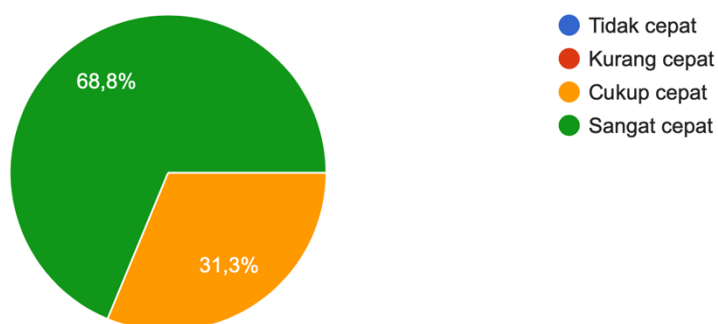
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang maklumat pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggaraan layanan informasi publik?

16 jawaban



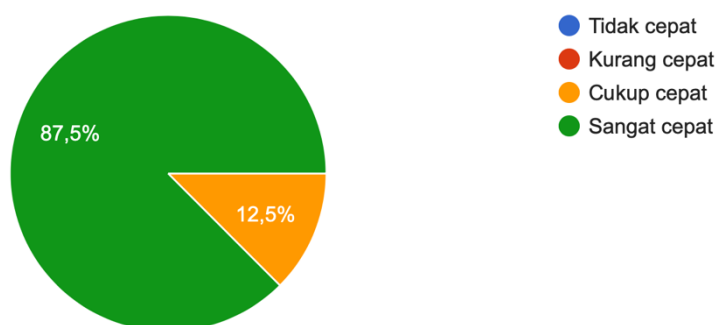
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan penanganan keberatan atas informasi publik?

16 jawaban



10. Bagaimana pendapat saudara tentang keterbukaan informasi publik Kantor Bahasa Provinssi Nusa Tenggara Barat?

16 jawaban



BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP) sangat tepat dengan persentase 87,5%, bagan prosedur pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP)) sangat tepat dengan persentase 87,5%, ketetapan waktu pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP) sangat tepat dengan persentase 87,5%, keharusan mengkopi bahan informasi Kebijakan Informasi Publik (KIP) dengan persentase 62,5%, kesesuaian informasi yang diberikan dan diterima sangat sesuai dengan persentase 87,5%, penguasaan materi oleh petugas dalam memberikan informasi layanan sangat sesuai dengan persentase 81,3%, kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan informasi sangat menguasai dengan persentase 81,3%, kesanggupan tentang maklumat pernyataan dan kewajiban penyelenggaraan layanan informasi publik sangat sanggup dengan persentase 81,3%, kecepatan penanganan keberatan atas informasi publik sangat cepat dengan persentase 68,8%, dan kecepatan keterbukaan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi NTB dengan persentase 88,2%.

Berdasarkan data hasil instrumen pengawasan dan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa Kebijakan Informasi Publik (KIP) triwulan I yang dijalankan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah cukup tepat, sesuai, dan mudah. Hal ini tertera pada hasil data dengan poin ketepatan informasi public yang diberikan, keharusan mengikuti prosedur pemerolehan informasi publik, ketetapan waktu pemberian informasi publik, keharusan mengkopi bahan informasi yang diminta, penguasaan materi oleh petugas

dalam memberikan informasi layanan publik, kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan informasi publik, maklumat pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggaraan layanan informasi publik, kecepatan penanganan keberatan atas informasi publik, dan keterbukaan informasi publik Kantor Bahasa Provinsi NTB. Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP) sesuai tupoksi, sesuai dengan tugas yang diampu, dan kesanggupan mengikuti maklumat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah cukup baik dengan pemerolehan hasil di atas atau rata-rata 80%. Akan tetapi, walaupun hasil pada umumnya menunjukkan tren positif dengan mayoritas hasil instrumen menunjukkan angka persentase di atas atau rata-rata 80%, ada beberapa poin yang harus mendapat perhatian maksimal untuk perbaikan dan peningkatan ketepatan prosedur, bagan alur, ketetapan waktu, kecepatan penanganan perbaikan, perbaikan bagian pengembangan dan layanan kantor, dan perbaikan bagian pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP).

2. Saran

Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP) triwulan I tahun 2023 dapat disampaikan rekomendasi berikut ini.

- a. Perbaikan layanan petugas pemberi informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Pemberian layanan informasi publik yang lebih baik lagi.